



## **ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DALAM PROVINSI JAMBI**

**Dinda Ayu Wulandari**

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

**Zulgani**

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

**Erni Achmad**

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*Korespondensi penulis:* [hellodinda809@gmail.com](mailto:hellodinda809@gmail.com)

**Abstract.** This study aims to analyze the impact of economic growth and district/city minimum wages on income inequality in Jambi Province during the 2019–2023 period. The method employed is panel data regression using the fixed effect model approach, with the aid of EVViews software. The results show that economic growth has no significant effect on income inequality, while minimum wages have a positive and significant effect. This finding suggests that increases in minimum wages may actually exacerbate inequality, as the benefits are mostly felt by workers in the formal sector, while those in the informal sector do not experience the same advantages. These results highlight the importance of inclusive policies that go beyond wage increases, focusing instead on equitable development, empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and improved access to education and healthcare services.

**Keywords:** Income Inequality, Economic Growth, Minimum Wage, Panel Data, EVViews.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi selama periode 2019–2023. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan fixed effect model menggunakan perangkat lunak eviews. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum justru dapat meningkatkan ketimpangan, karena manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh pekerja di sektor formal, sedangkan pekerja sektor informal tidak mendapatkan keuntungan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, tidak hanya berfokus pada kenaikan upah, tetapi juga mencakup pemerataan pembangunan, pemberdayaan umkm, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

**Kata Kunci:** Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Data Panel, EVViews.

### **PENDAHULUAN**

Ketimpangan pendapatan adalah kondisi di mana hasil pembangunan suatu negara belum merata dirasakan oleh seluruh warganya disebut sebagai ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan muncul ketika hasil pembangunan suatu negara tidak bisa diakses secara adil untuk seluruh lapisan masyarakat (Helmy et al., 2024). Michael P. dan Smith (2011) menekankan bahwa ketimpangan ini mencerminkan perbedaan dalam pembagian pendapatan di antara kelompok sosial, baik yang berkaitan dengan kepemilikan individu maupun peran faktor produksi.

Ketimpangan pendapatan antar daerah terjadi karena adanya perbedaan dalam komposisi penduduk, potensi sumber daya alam, serta ciri khas masing-masing wilayah. Perbedaan ini mencerminkan adanya kesenjangan pendapatan antara masyarakat di daerah yang sudah berkembang dan daerah yang masih tertinggal. Semakin besar ketimpangan tersebut, semakin tidak meratanya distribusi pendapatan di tengah

masyarakat. Situasi ini menyebabkan jurang ekonomi yang makin lebar antara kelompok berpenghasilan tinggi dan mereka yang berpendapatan rendah (Todaro, 2011).

Beberapa indikator yang lazim digunakan untuk mengukur ketimpangan meliputi indeks gini, indeks theil, dan ukuran ketimpangan versi bank dunia. Dalam penelitian ini, indikator yang dipilih adalah indeks gini. Indeks gini merupakan alat ukur ketimpangan yang paling sering digunakan dan mencerminkan tingkat ketimpangan secara agregat, dengan rentang nilai antara nol hingga satu. Nilai nol menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, sedangkan nilai satu menunjukkan ketimpangan yang sangat ekstrem.

Dalam Provinsi Jambi ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi isu utama dalam pembangunan. Meskipun wilayah ini mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir, manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor unggulan, seperti perkebunan kelapa sawit, karet, dan pertambangan, cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sedangkan masyarakat miskin, khususnya di pedesaan, masih tertinggal dalam keterlibatan aktivitas ekonomi produktif.

**Tabel 1.** Gini Ratio Kabupaten atau Kota di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 (Indeks)

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Jambi	0.34	0.34	0.35	0.36	0.37
Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0.28	0.28	0.25	0.26	0.32
Kabupaten Muaro Jambi	0.29	0.28	0.32	0.27	0.34
Kabupaten Sarolangun	0.27	0.31	0.32	0.3	0.38
Kota Sungai Penuh	0.33	0.31	0.31	0.29	0.31
Kabupaten Kerinci	0.29	0.28	0.28	0.28	0.3
Kabupaten Bungo	0.33	0.31	0.3	0.32	0.28
Kabupaten Merangin	0.31	0.32	0.29	0.35	0.36
Kabupaten Batanghari	0.31	0.32	0.31	0.29	0.36
Kabupaten Tanjung Jabung Timur	0.29	0.25	0.25	0.27	0.31
Kabupaten Tebo	0.26	0.3	0.3	0.3	0.24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2024.

Tabel 1. Menyajikan nilai Gini Ratio untuk kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2019–2023. Gini ratio berfungsi sebagai ukuran ketimpangan distribusi pendapatan, dengan skala dari 0 hingga 1, nilai yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat ketidakmerataan yang lebih besar, sedangkan nilai yang lebih rendah merepresentasikan kondisi distribusi pendapatan yang lebih seimbang. Kota Jambi, gini ratio tercatat naik dari 0,34 pada 2019 menjadi 0,37 pada 2023, menandakan peningkatan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan dari 0,28 pada 2019 menjadi 0,26 pada 2022, yang mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan. Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan dinamika, yakni meningkat menjadi 0,32 pada 2021 sebelum menurun kembali menjadi 0,27 pada 2022, yang berarti ketimpangan sempat meningkat tetapi kemudian membaik. Di sisi lain, Kabupaten Kerinci mempertahankan nilai yang relatif stabil sekitar 0,28, menandakan ketimpangan pendapatan yang konsisten. Ketimpangan semakin diperburuk oleh perbedaan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Lathifah et al., 2024).

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan memiliki frekuensi yang berhubungan

dengan laju pertumbuhan ekonomi jika pendapatan penduduk perkotaan lebih besar dari pendapatan penduduk pedesaan, semakin tinggi rasio keuntungan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan pendapatan tetap signifikan. Secara teoritis, peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya disertai penurunan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi justru sering memperlebar kesenjangan (Istiqamah et al., 2018).

Selain pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum juga memiliki peran penting dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan. Penetapan upah minimum bertujuan melindungi pekerja dengan pendapatan rendah, namun dalam praktiknya seringkali hanya berdampak signifikan pada pekerja formal, sementara pekerja sektor informal kurang merasakan manfaatnya. Hal ini menimbulkan fenomena di mana kenaikan upah minimum tidak otomatis mengurangi ketimpangan, bahkan berpotensi memperbesarnya

Berdasarkan penelitian Riandi & Varlitya (2020), Upah Minimum Provinsi terbukti mempunyai efek negatif yang berpengaruh pada kesenjangan penghasilan, sedangkan tingkat kemiskinan berkontribusi secara positif dan berpengaruh pada meningkatnya kesenjangan tersebut.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Khoirudin & Musta'in (2020), dengan judul "Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta", ditemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka serta upah minimum di berbagai distrik mempunyai pengaruh positif yang berpengaruh dalam ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, faktor perkembangan ekonomi serta desentralisasi fiskal tidak menunjukkan dampak yang bermakna dalam ketimpangan tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten atau Kota Di Dalam Provinsi Jambi” pada periode 2019–2023. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi (X1), upah minimum kabupaten (X2) dan ketimpangan pendapatan (Y) kabupaten dalam provinsi Jambi tahun 2019-2023 dan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1) dan upah minimum kabupaten (X2) terhadap tingkat ketimpangan pendapatan kabupaten atau kota dalam Provinsi Jambi tahun 2019-2023

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dalam rentang waktu tahun 2019-2023 yang meliputi data Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten dan Ketimpangan Pendapatan (gini ratio) Kabupaten atau Kota di dalam Provinsi Jambi. Sumber data yang digunakan berasal dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik dan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait perubahan diketahui dengan penjelasan dengan analisis deskriptif.

Untuk menjawab permasalahan yang ke dua digunakan analisis regresi data panel. Menurut Widarjono (2018) bahwa data panel merupakan gabungan antara data silang (cross section) dan data runtun waktu (time series). Model persamaan yang digunakan sebagai berikut sesuai metode regresi data panel dengan pengujian model terbaik CEM, FEM, REM sebagaimana diuraikan oleh (Ghozali & Ratmono, 2017).

Keterangan:

- $Y_{it}$  : Indeks Gini (ketimpangan pendapatan) di kabupaten/kota i pada waktu t  
 $\beta_0$  : Konstanta (intersep).  
 $X1_{it}$  : Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota i pada waktu t.  
 $X2_{it}$  : Upah minimum kabupaten/kota i pada waktu t.  
 $\beta_1, \beta_2$  : Koefisien estimasi variabel bebas  
(mencerminkan pengaruh terhadap GINI).  
 $e_{it}$  : *Error term* (pengganggu) di kabupaten/kota ii pada waktu t.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Selama periode 2019-2023 pertumbuhan ekonomi mencakup peningkatan pasar tenaga kerja dan produktivitas, yang menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan tersebut. Peningkatan kualitas tenaga kerja juga berperan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menyediakan berbagai sumber daya yang mendukung pembangunan manusia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator keberhasilan pembangunan. Patta Rapanna (2017), dalam buku Ekonomi Pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya pendapatan tanpa harus dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Berikut adalah Hasil analisis tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi (2018–2023)

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan variasi di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memberikan dampak signifikan, dengan penurunan tajam pada beberapa sektor, terutama transportasi, penyediaan akomodasi, dan administrasi pemerintah. Kota Jambi, sebagai pusat perekonomian, mencatat pertumbuhan rata-rata 3,72%, meskipun mengalami kontraksi pada 2020 sebesar -4,24%. Sektor transportasi dan perdagangan turun signifikan (-23,12%), serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (-6,59%).

Kabupaten Batang Hari mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi, dengan rata-rata 5,19%, berkat dinamika ekonomi yang kuat dan kontribusi stabil dari sektor-sektor produktif seperti pertambangan dan industri pengolahan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat pertumbuhan yang stabil dengan rata-rata 3,24%, meskipun sempat melambat pada 2020 akibat pandemi. Sebaliknya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat pertumbuhan terendah, yakni 0,73%, akibat ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan terbatasnya diversifikasi ekonomi. Beberapa sektor seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan rendah, sementara sektor industri pengolahan belum berkembang optimal.

Meskipun beberapa sektor menunjukkan pemulihan pascapandemi, ketimpangan antar sektor di Tanjung Jabung Timur masih menjadi tantangan utama. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut tetap paling rendah di Provinsi Jambi selama periode 2019–2023. Faktor-faktor seperti infrastruktur, kebijakan pemerintah daerah, serta diversifikasi ekonomi sangat memengaruhi performa ekonomi tiap wilayah, dan pemahaman tren ini menjadi penting untuk merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selama periode tahun 2019-2023 UMK di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang bervariasi dari tahun ke tahun. Secara umum, UMK mengalami tren kenaikan setiap tahunnya, meskipun besarnya berbeda antar daerah. Kenaikan UMK ini ditentukan oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebutuhan hidup layak, serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.

upah minimum di Provinsi Jambi menunjukkan perbedaan nominal dan persentase pertumbuhan tahunan untuk masing-masing daerah. Proses penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dilakukan melalui Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, serikat buruh, Apindo, dan akademisi, serta disahkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jambi. Untuk daerah dengan UMK lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP), UMP berlaku sebagai batas minimum.

Berdasarkan data yang disarikan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Kota Jambi mencatatkan UMK tertinggi pada 2023 dengan rata-rata pertumbuhan 6,14%. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Sarolangun menunjukkan pertumbuhan konsisten dengan rata-rata masing-masing 4,22% dan 5,95%. Sementara itu, kabupaten/kota lain seperti Sungai Penuh, Kerinci, Bungo, Merangin, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo menunjukkan tren perkembangan yang seragam dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,78%, yang disebabkan oleh stabilitas nominal UMK sejak 2019 hingga 2020, baru mengalami peningkatan signifikan pada 2021 dan seterusnya.

Kota Jambi, sebagai pusat perekonomian, memiliki UMK tertinggi yang mencerminkan kondisi ekonomi perkotaan dengan biaya hidup yang lebih tinggi. Sementara daerah yang lebih bergantung pada sektor tradisional cenderung menetapkan UMK yang lebih rendah, mengikuti standar UMP yang telah ditetapkan pemerintah provinsi. Hal ini mencerminkan perbedaan struktur ekonomi antarwilayah, dengan daerah yang memiliki sektor industri dan jasa yang lebih berkembang dapat menetapkan UMK lebih tinggi, sementara daerah dengan perekonomian berbasis sektor tradisional masih mengacu pada UMP.

Selama periode rasio gini untuk periode 2019–2023 di Provinsi Jambi menunjukkan variasi ketimpangan pendapatan di setiap kabupaten/kota. Kota Jambi memiliki rasio gini tertinggi dengan rata-rata 0,348, menandakan ketimpangan pendapatan yang paling signifikan di provinsi ini. Di sisi lain, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatatkan rasio gini terendah, yaitu 0,278, yang menunjukkan distribusi pendapatan lebih merata.

Kabupaten-kabupaten lain seperti Muaro Jambi, Bungo, dan Tebo berada pada kisaran menengah dengan nilai sekitar 0,28–0,31. Sementara Merangin dan Batanghari mencatatkan rasio gini di atas 0,33, mengindikasikan ketimpangan yang relatif tinggi.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, data menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan dan ketimpangan pendapatan tidak selalu sejalan. Kota Jambi, meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (rata-rata 3,72%), tetap mengalami ketimpangan yang tinggi, dengan gini ratio 0,348. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi, yang cenderung menguntungkan kelompok menengah ke atas, terutama di sektor perdagangan dan jasa modern.

Sebaliknya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah (0,73%) memiliki ketimpangan pendapatan yang lebih rendah pula, dengan gini ratio 0,278. Struktur ekonominya yang dominan di sektor primer, seperti pertanian dan perkebunan, memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata di antara rumah tangga.

Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi (4,69%) dengan rasio gini 0,302, menandakan ketimpangan yang lebih moderat. Struktur ekonomi yang didorong oleh sektor pertanian dan industri yang berkembang memberikan dampak yang lebih inklusif terhadap pemerataan pendapatan masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, sementara sektor primer yang lebih merata, meskipun kurang berkembang, dapat menjaga kesetaraan distribusi pendapatan meskipun pertumbuhannya lebih lambat.

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten atau Kota Di Dalam Provinsi Jambi**

**Tabel 2.** Hasil pengujian regresi data panel

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 08/21/25 Time: 01:08  
 Sample: 2019 2023  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 11  
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.218777	0.040207	5.441320	0.0000
X1	0.000103	0.001346	0.076660	0.9393
X2	3.19E-05	1.50E-05	2.128738	0.0392
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.551871	Mean dependent var	0.304364	
Adjusted R-squared	0.423835	S.D. dependent var	0.032304	
S.E. of regression	0.024521	Akaike info criterion	-4.375529	
Sum squared resid	0.025253	Schwarz criterion	-3.901068	
Log likelihood	133.3270	Hannan-Quinn criter.	-4.192051	
F-statistic	4.310259	Durbin-Watson stat	2.096433	
Prob(F-statistic)	0.000195			

Berdasarkan hasil pengujian tabel 5 maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0.218776918744 + 0.000103195404584*X1 + 3.19044390237e-05*X2 + \epsilon_{it} \dots (2)$$

Koefisien untuk variabel PDRB ADHK (X1) sebesar 0,00011 mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang berarti setiap peningkatan satu persen X1 akan menyebabkan kenaikan Indeks Gini (Y) sebesar 0,000103%, dan sebaliknya jika mengalami penurunan.

Koefisien variabel UMK (X2) sebesar 3,19045 menandakan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan yang berarti setiap peningkatan satu unit pada X2 akan meningkatkan nilai Indeks Gini (Y) sebesar 3,19045, demikian pula berlaku kebalikannya.

### Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi menggunakan model fixed effect, nilai t-hitung untuk variabel X1 (Pertumbuhan Ekonomi) tercatat sebesar 0,076660 dengan tingkat signifikansi 0,9393. Dengan mempertimbangkan  $\alpha = 0,05$  dan derajat kebebasan  $df = n - k = 55 - 3 = 52$ , diperoleh t-tabel sebesar 2,0057. Karena t-hitung (0,076660) lebih kecil dari t-tabel (2,0057) dan signifikansi (0,9393) melebihi 0,05, maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima sementara hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel X1 tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi.

### Variabel Upah Minimum Kabupaten

Berdasarkan analisis regresi menggunakan metode *fixed effect*, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel X2 (Upah Minimum Kabupaten/Kota) sebesar 2,128738 dengan tingkat signifikansi 0,0392. Dengan mempertimbangkan  $\alpha = 0,05$  dan derajat kebebasan ( $df$ ) = 52,

diperoleh t-tabel sebesar 2,0057. Karena t-hitung (2,128738) lebih besar daripada t-tabel (2,0057) dan nilai signifikansi (0,0392) lebih kecil dari 0,05,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel  $X_2$  memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi.

## **KESIMPULAN**

Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten di Provinsi Jambi selama periode 2019–2023 cenderung mengalami peningkatan, meskipun terdapat perlambatan sementara akibat dampak pandemi. Namun, berbeda dengan ketimpangan pendapatan yang nilai indeksnya masih berfluktuatif dari tahun 2019-2023.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Sementara itu, Kenaikan upah minimum pada level kabupaten/kota ternyata berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap disparitas pendapatan, mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum cenderung meningkatkan ketimpangan karena lebih banyak dirasakan oleh pekerja formal dibandingkan pekerja sektor informal. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,551871 mengindikasikan bahwa sekitar 55,19% variasi dalam ketimpangan pendapatan dapat dijelaskan oleh kedua variabel yang diteliti, sementara sisanya sebesar 44,81% dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain yang tidak tercakup dalam model analisis.

## **SARAN**

Pemerintah daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat meningkatkan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pembangunan yang inklusif, seperti pemerataan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat berpendapatan rendah, memperluas jangkauan kebijakan upah minimum agar tidak hanya berlaku bagi pekerja formal, tetapi juga menjangkau sektor informal, disertai pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kebijakan pengupahan di perusahaan dan untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel tambahan yang berpotensi berdampak pada ketimpangan pendapatan, seperti kualitas pendidikan, tingkat pengangguran, dan pemerataan infrastruktur, sekaligus memperluas cakupan waktu penelitian serta menerapkan metode analisis alternatif guna memperkokoh validitas temuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari. (2024a). Kabupaten Batang Hari dalam Angka 2024 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari . <https://batangharikab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/5ba57dfd584f5a1d997b01bc/kabupaten-batang-hari-dalam-angka-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi. (2024b). Kabupaten Muaro Jambi dalam Angka 2024 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi . <https://muarojambikab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/01a251888576c92f28752ba9/kabupaten-muaro-jambi-dalam-angka-2024.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (2024c). Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Angka 2024 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Barat . <https://tanjabbarikab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/2dfcd575214ccf8ad18c1>

171/kabupaten-tanjung-jabung-barat-dalam-angka-2024.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2024d). Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka 2024 . Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur

<https://tanjabtimkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/2736cff3180f376b797954c/kabupaten-tanjung-jabung-timur-dalam-angka-2024.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (22 September 2025). Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota , 2020. Diakses pada 2 Oktober 2025, dari <https://jambi.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/gini-rasio-kabupaten-kota-.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. (28 Februari 2024). Provinsi Jambi Dalam Angka 2024. Diakses pada 2 Oktober 2025, dari <https://jambi.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/e697127048eeb86bba8d8d40/provinsi-jambi-dalam-angka-2024.html>

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10. In Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Helmy, A., Nujum, S., & Selong, A. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Selatan. SEIKO : Journal of Management & Business, 7(1), 2024–2907.

Istiqamah, I., Syaparuddin, S., & Rahmadi, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia). E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 7(3), 111–126. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v7i3.6903>

Lathifah, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2024). Transformasi Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah Di Era Globalisasi. Jurnal Professional, 11(2), 577–584.

Michael P. dan Smith, S. T. (2011). Pembangunan Ekonomi. Erlangga.

Patta Rapanna, Z. S. (2017). EKONOMI PEMBANGUNAN (H. Syamsul (ed.)). CV SAH MEDIA.

Riandi, M., & Varlyta, C. R. (2020). Pengaruh Kemiskinan Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera Indonesia. Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v6i1.2008>

Widarjono, A. (2018). EKONOMETRIKA (ke empat). UPP STIM YKPN.